

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

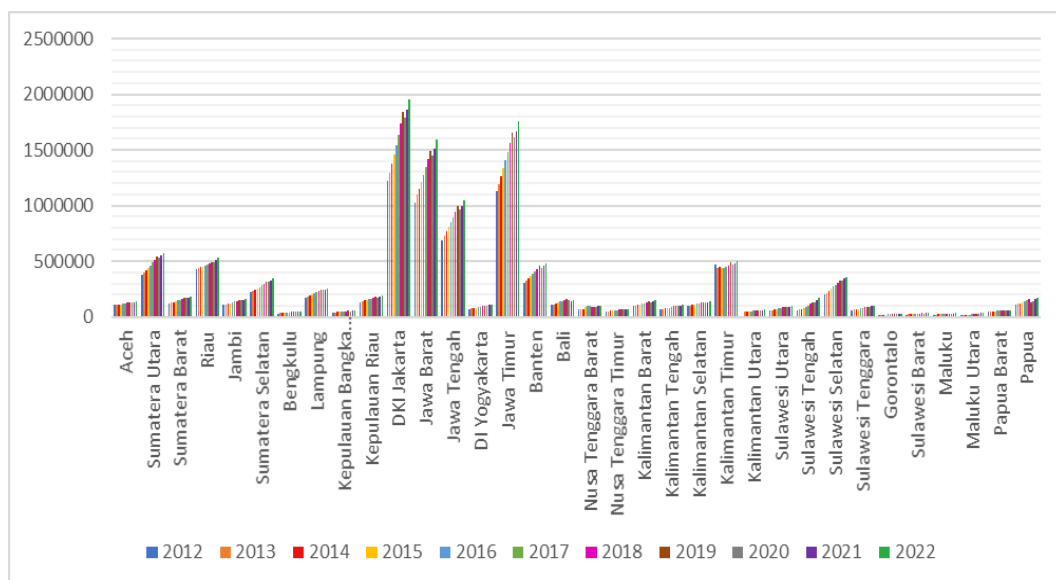
### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah diberikan memiliki wewenang dalam pengolahan seluruh sumber daya yang tersedia di daerahnya, peraturan ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang wewenang pemerintah daerah dalam membangun ekonomi daerahnya. Menurut Kuncoro (2004), pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam upaya pengolahan sumber daya daerah serta penciptaan lapangan kerja yang berperan dalam mendorong kegiatan perekonomian daerah tersebut.

Potensi suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing. Maka, kebijakan utama yang perlu diterapkan adalah pemanfaatan potensi daerah secara maksimal guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut (Yulianita, 2009). Arsyad (2005) menambahkan, masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan.

Dalam perkembangannya, kinerja ekonomi daerah dapat dilihat dari pergerakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersifat fluktuatif. Contohnya apabila pergerakan nilai PDRB positif maka menunjukkan adanya peningkatan pada perekonomian daerah, begitupun sebaliknya apabila nilai PDRB

negatif maka terjadi penurunan perekonomian di daerah tersebut. Produk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri merupakan total keseluruhan nilai barang dan jasa yang mampu diproduksi dalam suatu daerah dalam rentan waktu satu tahun. Pada prose praktiknya kemampuan setiap sektor ekonomi dalam PDRB berbeda yang akhirnya akan menimbulkan kesenjangan, Maka dari itu, perlu dilakukannya skala prioritas dalam mennetukan sektor-sektor unggulan dalam suatu daerah (Diana, Sulistiowati, dan Hadi, 2017)

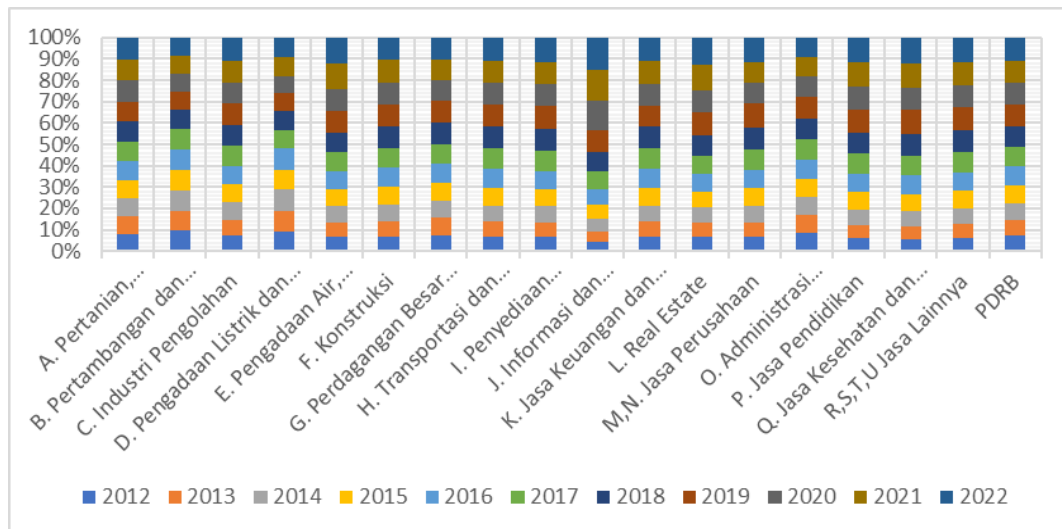


Sumber : BPS, data diolah peneliti

### Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Indonesia Tahun 2012-2022 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Atas Dasar Harga Konstan ke-3 tertinggi secara nasional di bawah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Fenomena tersebut tidak asing mengingat bahwa Provinsi Jawa barat sendiri pada tahun 2022 memiliki penduduk terbanyak di Indonesia sekitar

49.405.810 jiwa dan luas wilayah sebesar 37.040 km<sup>2</sup> yang tersebar di 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

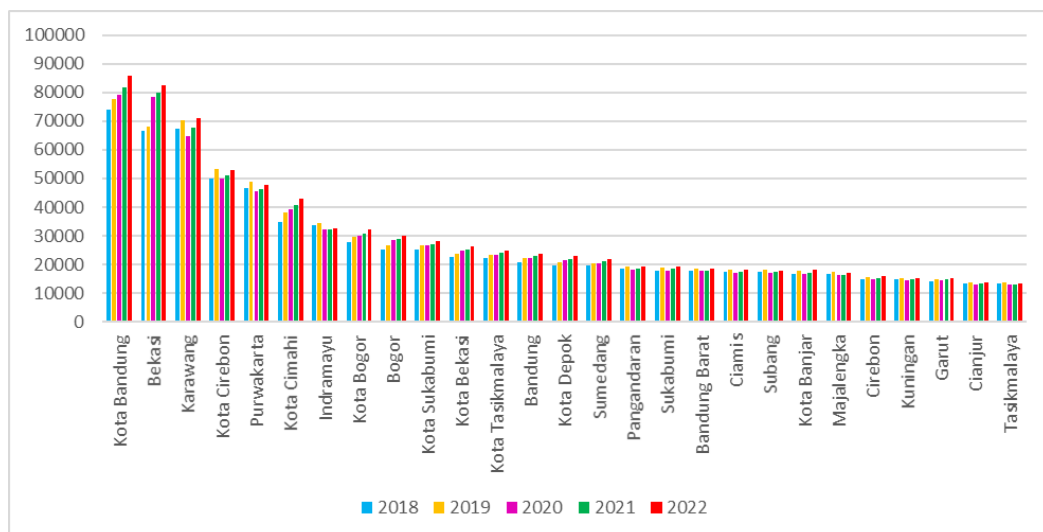


Sumber : BPS, data diolah peneliti

**Gambar 1.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2012-2022 (Miliar Rupiah)**

Menurut data BPS perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 mencapai Rp 627,00 triliun dan atas dasar harga konstan seri 2010 mencapai Rp 405,76 triliun. Ekonomi Jawa Barat tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45% yang meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 3,74%. Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dari sisi lapangan usaha berdasarkan gambar 1.2 di atas, yaitu sebagian besar disumbang oleh industri pengolahan sebesar 2,97%, lalu diikuti oleh perdagangan besar dan eceran 0,62%, transportasi dan pergudangan 0,50%, informasi dan komunikasi 0,37%, dan sektor lainnya sebesar 0,99%.

Selain pada pertumbuhan ekonomi provinsi, pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota juga merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi dapat merata pada setiap wilayah. Pada saat ini Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota yang tersebar dengan karakteristik sumber daya alam, ekonomi dan demografi yang cenderung berbeda-beda. Sehingga yang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak tercipta di seluruh wilayah melainkan hanya di kota besar dan kota industri. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan melihat PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah total dari PDRB masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di masing-masing kabupaten/kota.



Sumber : BPS, data diolah peneliti

**Gambar 1.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita 27 Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**

Berdasarkan gambar grafik 1.3, nilai PDRB per kapita 27 kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2018-2022 secara konsisten terdapat lima kabupaten/kota yang

memiliki pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi. Seperti nilai rata-rata PDRB per kapita selama periode 2018-2022, yaitu Kota Bandung sebesar 79.605 rupiah, Kabupaten Bekasi 75.068 rupiah, Kabupaten Karawang 68.181 rupiah, Kota Cirebon 51.419 rupiah, dan Kabupaten Purwakarta 47.043 rupiah. Atas data tersebut dapat dikatakan bahwa selama periode 2018-2022, kelima kabupaten/kota tersebut dinyatakan secara konsisten dan signifikan berada sebagai lima kabupaten/kota dengan pendapatan PDRB per kapita tertinggi dan menjadi kabupaten/kota paling sejahtera secara per kapita di Provinsi Jawa Barat.

Dapat dikatakan bahwa Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta merupakan lima kabupaten/kota yang menjadi pusat perekonomian di Provinsi Jawa Barat pada saat ini yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Satria (2014), biasanya sulit bagi daerah untuk berkembang pesat pada saat yang bersamaan maka dilakukan pendongkrakan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pembangunan pusat pertumbuhan *growth poles* yang dapat mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya.

Menurut Tarigan (2015), teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya ekspor di wilayah tersebut, maka sektor perekonomian regional dibagi menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan sektor non basis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan Analisis Gabungan Keduanya untuk mengukur dan mengetahui sektor apa saja di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten

Purwakarta yang termasuk sektor basis dan sektor non basis, serta dapat diketahui apakah sektor tersebut termasuk sektor yang potensial atau tidak potensial. Setelah diketahui hasil analisisnya maka dapat dirumuskan sebuah strategi pengembangan sektor potensial tersebut.

Atas beberapa uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Sektor-Sektor Unggulan Lima Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi di Provinsi Jawa Barat”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan sebuah permasalahan, sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang termasuk sektor unggulan di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta?
2. Sektor apa saja yang termasuk sektor potensial di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana keadaan sektor unggulan dan sektor potensial di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang menjadi potensial di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui keadaan sektor unggulan dan sektor potensial di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan, sumber informasi dan referensi terbaru dalam mengkaji masalah yang sama dan bisa dikembangkan lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Akademisi

Sebagai bahan literatur atau referensi untuk penelitian selanjutnya di lima kabupaten/kota dengan pendapatan PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

2. Masyarakat

Sebagai penambah wawasan dan informasi khususnya bagi masyarakat Jawa Barat terkait kondisi terbaru sektor perekonomian regional mereka.

### 3. Pemerintah

Sebagai acuan dalam pertimbangan pembuatan regulasi terkait, guna meningkatkan potensi daerah khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lima kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2022 dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta beberapa jurnal terkait.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak terbitnya surat keputusan pembimbing skripsi. Adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan adalah, sebagai berikut:



